



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022**

**KECAMATAN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA
2017
KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Renstra Kecamatan Kotagede Periode 2017-2022 dapat tersusun. Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Kecamatan Kotagede. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2017-2022. Adapun pedoman yang dipakai adalah RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2017-2022

Renstra yang tersusun berisikan tentang program, kegiatan, input, output, outcome dan target pencapaian, baik untuk pencapaian tujuan dalam urusan administrasi perkantoran maupun program kegiatan kemasyarakatan.

Demikian, semoga renstra ini bermanfaat dan menjadi pedoman Kecamatan Kotagede untuk mencapai tujuan pembangunan pada 5 (lima) tahun ke depan.

Yogyakarta,

2017

Camat

HIDAYAT

197111191992031004

Drs NUR

NIP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KEPUTUSAN CAMAT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN Perangkat Daerah	II-1
1	II-1
2	II-4
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
1	III-1
2	
3	III-3
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-7
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-11 III-24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
1	IV-1
2	V-1
3	VI-1
4	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	VII-1
BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VIII-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BABVIII PENUTUP	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional, Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menyusun dokumen perencanaan lima tahunan.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 OPD Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta sebagai suatu pedoman guna menyusun Rencana Kerja SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun

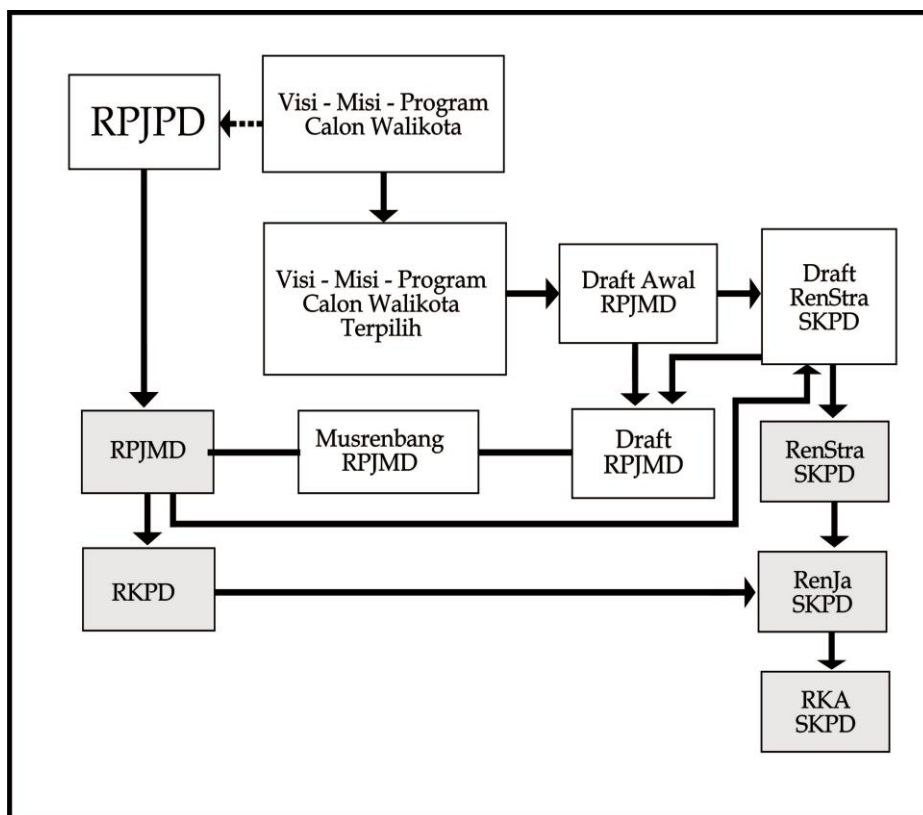
Kecamatan dan Kelurahan merupakan ujung tombak Pemerintah Daerah dalam fungsi pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Walikota.

Mengingat fungsi strategis Kecamatan dan Kelurahan tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan perlu difasilitasi dalam APBD sehingga menunjang optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan termasuk didalamnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang lebih lanjut mempengaruhi maksimalnya fungsi Kecamatan/Kelurahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renstra SKPD, Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk menjabarkan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan secara sistematis kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas OPD serta tolok ukur pencapaiannya.

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Kotagede dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Hubungan RPJMD dengan Renstra OPD adalah bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra OPD disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.



Dokumen Renstra Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 mengacu pada dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 , Renstra K/L, dan Renstra Propinsi, serta dibuat dengan menelaah dokumen hasil KLHS, Telaah Struktur Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang Wilayah . Renstra Kecamatan Kotagede dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kotagede sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Kotagede yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta:
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022:
17. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta:
18. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, yang menjadi pedoman bagi instansi maupun personil dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan selama periode Tahun 2017-2022.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

- a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.
- b. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

2.5 Latar Belakang

2.6 Landasan Hukum

2.7 Maksud dan Tujuan

2.8 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

3.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

3.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

4.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

4.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

4.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kotagede

2.1.1 Tugas

Tugas Utama Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing – masing. Pelayanan Publik khususnya dibidang pelayanan perizinan dan kependudukan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat mempunyai arti Kecamatan mempunyai tugas untuk Memberdayakan masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, memungkinkan suatu masyarakat dapat mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan. atau dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan Sebagian Urusan pemerintahan Daerah

Sesuai dengan Peraturan kedudukannya, Kecamatan mempunyai Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Yogyakarta untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelimpahan kewenangan tersebut diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintahan Kelurahan

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek :

1. perijinan;
2. rekomendasi atau kajian social kemasyarakatan;
3. koordinasi;
4. pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Mediasi;
9. Penyelenggaraan dan kewenangan lain.

2.1.2 Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 62 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan mempunyai fungsi

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

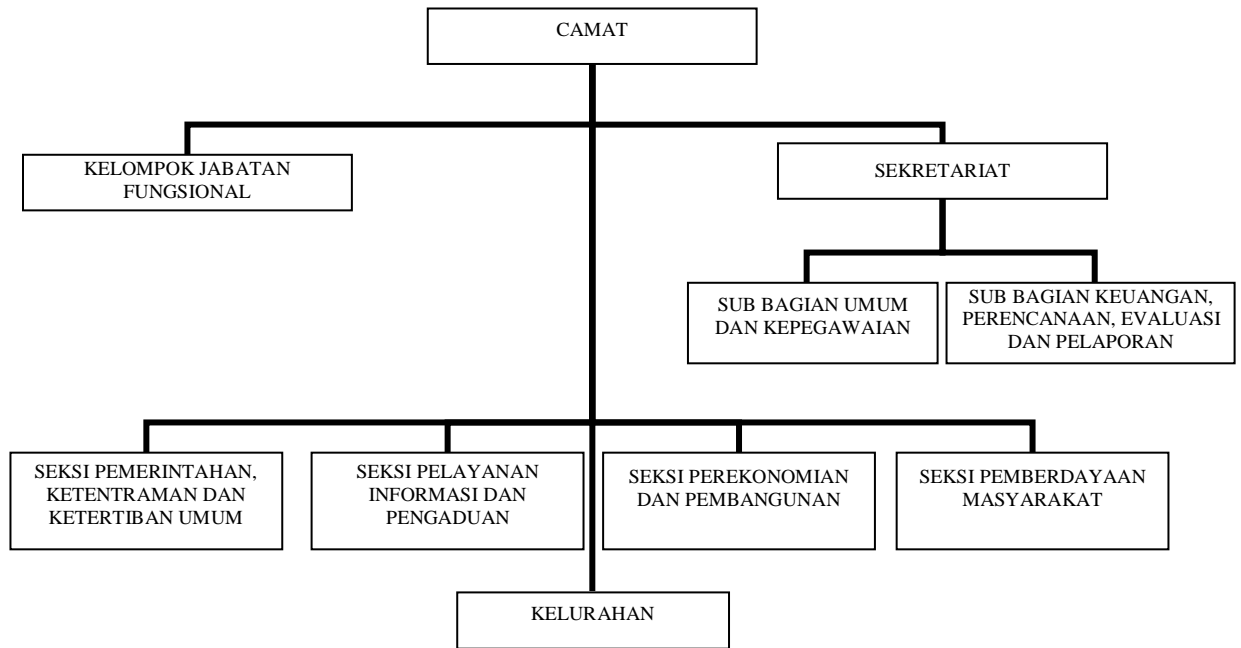
- d. Penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- g. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Kotagede

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomer : 118 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta menegaskan Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- 1. Camat
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban umum
- 4. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan.
- 5. Seksi Perekonomian dan pembangunan
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Kecamatan sebagai berikut :



Gambaran tentang organisasi Kecamatan Kotagede adalah :

- Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kotagede

Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Untuk mencapai kepuasan masyarakat dan kemandirian masyarakat Kecamatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dengan kualitas yang lebih baik sebagai instansi pelayan masyarakat umum Kecamatan Kotagede didukung oleh SDM dan Sarana Prasarana yang memadai.

Berikut ini SDM (Susunan Kepegawaian) dan Sarana Prasana yang dimiliki oleh Kecamatan Kotagede dalam menjalankan Tugasnya :

1) Susunan Kepegawaian

Jumlah personil aparat Instansi kecamatan Kotagede kondisi Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jumlah karyawan : 27 orang PNS, 4 orang PTT/Naban
7 Outsourching

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan :

Camat : Pembina, IV/b : 1 orang

Sekcam : Pembina, IV/a : 1 orang

Kasubbag Umum & Kepeg : Penata Muda, III/b : 1 orang

Kasubbag Keuangan,
,Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan : -

Kepala Seksi Kec : Penata Tk. I, III/d : 3 orang

Lurah : Penata Tk. I, III/d : 3 orang

Sekretaris Kelurahan : Penata III/c : 2 orang

Kepala Seksi Kelurahan : Penata III/c : 5 orang

Penata Muda Tk. I, III/b : 3 orang

Staf : Penata Muda III/a : 1 orang

Pengatur Tk. II/d : 4 orang

Pengatur II/c : 2 orang

Pengatur Muda II/a : 1 orang

Adapun data selengkapnya Personil Kecamatan Kotagede tersebut adalah sebagai berikut :

No.	N A M A	JABATAN	GOL	PENDIDIKAN
1	Drs. Nur Hidayat	Camat	IV/b	S2
2	Drs. Tur Arya Warih	Sekcam	IV/a	S1
3	Siti Mahmudah Setyaningsih,S.AP	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	III/b	S1
4		Ka Sub Bag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		
5	Dwi Ernayati, AMKG, SE	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	III/d	S1
6	Heru Nugroho,S.Sos.	Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban	III/d	S1
7	Enik Hambanari	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III/d	SMA
8		Kasi Perekonomian dan Pembangunan		
9		Pranata Komputer		

10	Sartilah, SIP	Pengadministrasi Kepegawaian (Pengadministrasi Kepegawaian dan Pemelihara Barang)	III/a	S1
11	Ngatija	Pengadministrasi Umum (Pengadministrasi Persuratan dan Pengurus Barang)	II/d	SMA
12	Setya Rini Ika Hapsari, SE	Bendahara	II/d	S1
13	Ageng Ratri Suhertian, A.Md	Analisis Anggaran	II/d	D3
14	Novi Widiastuti, A.Md.	Pengelola SAK (Pengelola SAK dan Pemegang Buku Pengeluaran)	II/c	D3
15	Kuwadi,A.MD	Pengelola Perizinan	II/d	D3
16	Muja Wagiyono	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	II/a	SMP
17	Yully Harmoko	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	II/c	SMA
18	Mujiyo	NABAN		SMK
	KEL. REJOWINANGUN			
1	Wulan Purwandari, S.STP	Lurah Rejowinangun	III/d	D.IV
2		Sekretaris Lurah		
3	Moch. Ismail, SH	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	III/b	S1
4	Hariyono	Kasi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	III/c	SMA
5	Parjilah	Kasi Perekonomian, dan Pemberdayaan	III/c	SMA
6	Yoni Risyanto	NABAN		SMK
	KEL. PRENGGAN			
1	Kus Surasa, SIP	Lurah Prenggan	III/d	S1
2	Heri Pujianto, BA.	Sekretaris Lurah	III/c	D3
3	Dyah Sugiyatmi Handayawati, SE	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	III/d	S1
4		Kasi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban		
5	Mustakhanah, S.Sos	Kasi Perekonomian, dan Pemberdayaan	III/d	S1
6	Dema Maharani Anggrainy Putri	NABAN		SMA
	KEL. PURBAYAN			
1	Drs. Waris Sumarwoto	Lurah Purbayan	III/d	S1
2	Budiantara	Sekretaris Lurah	III/c	SMA
3	Kudup Nawangsasi, SP	Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan	III/c	S1
4	Saroso	Kasi Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	III/c	SMA
5	Sri Yuantoro	Kasi Perekonomian, dan Pemberdayaan	III/c	SMA
6	Sarjana	NABAN		SMA

2) Perlengkapan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka gedung kantor kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran. Tahun 2016 Gedung Kecamatan telah di pugar dan didirikan gedung yang baru, walaupun ruang subag umum dan kepegawaian dan gudang masi gedung yang lama dan masih belum maksimal dalam pemeliharaannya, juga belum mempunyai dapur yang digunakan untuk membuat minum untuk pegawai dan tamu, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk gedung Kelurahan Prenggan dan Purbayan yang dirasa masih belum sebagus dan senyaman Kelurahan Rejowinangun yang pada Tahun 2015 dan 2016 diperbaiki. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer.

Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Kotagede.

Barang yang tersedia

No	Jenis Barang	Jumlah
1	AC	7 unit
2	Air Purifier	5 unit
3	Alat Pemadam Kebakaran	41 buah
4	Almari Besi 2 Pintu	2 buah
5	Almari Besi Lereg Kaca	2 buah
6	Almari Buku	1 buah
7	Almari Kayu	10 buah
8	Almari Piala	2 buah
9	Rak Besi Siku	3 buah
10	Rak Kayu	2 buah
11	Rak Buku	1 buah
12	Bangku	2 buah
13	Bangku Tunggu	3 buah
14	Dispenser	8 buah
15	Mesin Faximile	2 unit
16	Filling Cabinet	27 buah
17	Handy Talky	1 unit
18	I-Phone	3 unit
19	Pesawat Telepon	5 unit
20	PABX	2 unit

21	PC Kios K	1 unit
22	Kamera Foto	4 buah
23	Kipas Angin	23 buah
24	Komputer PC	19 unit
25	Komputer Tablet	1 unit
26	Laptop/notebook	4 unit
27	Printer	14 unit
28	Scanner	1 unit
29	UPS	3 unit
30	Kursi Kayu	9 buah
31	Kursi Putar	5 buah
32	Kursi Besi	25 buah
33	Kursi Kerja	20 buah
34	Kursi Lipat	276 buah
35	Kursi Rapat Susun	42 buah
36	Kursi Tunggu 4 Seat Besi	2 buah
37	Kursi Tangan	4 buah
38	Layar Proyektor Tripod/96	1 unit
39	LCD Proyektor	3 unit
40	Televisi	6 unit
41	Loudspeaker	2 unit
42	Meja Telepon	2 buah
43	Meja Tulis	9 buah
44	Meja Tambahan	15 buah
45	Meja ½ Biro	4 buah
46	Meja Knap	4 buah
47	Meja Komputer	8 buah
48	Meja Kursi Tamu/Zice	2 buah
49	Meja Panjang	18 buah
50	Meja Rapat	22 buah
51	Sofa	4 buah
52	Mesin Gergaji	1 buah
53	Mesin Ketik	6 buah
54	Mesin Presensi Sidik Jari	1 unit
55	Microphone	3 buah
56	Pompa Air	1 unit
57	Tangga Lipat Alumunium	2 buah
58	Wearles With Public Address	1 buah
59	Whiteboard	1 buah
60	Wireless Cassette	2 buah
61	Lemari es	2 unit
62	Sepeda	7 unit
63	Sepeda Motor	16 unit
64	Kendaraan Bermotor Roda 3	1 unit
65	Minibus	1 buah
66	Kursi tamu/Zice	1 unit
67	Spring Bed	2 buah
68	Almari 3 pintu	2 buah
69	Kompor 2 tungku	1 buah
70	Tabung Gas	1 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kotagede pada periode Tahun 2012 – 2016 diukur berdasarkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada warga yang datang ke Kecamatan secara acak.

Berikut ini rekapitan dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kotagede selama periode Tahun 2012 – 2017 :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede
Kota Yogyakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	305.537.820	576.574.044	515.505.350	675.660.018	718.793.420	286.148.386	512.822.587	440.833.535	573.843.897	638.328.958,24	93,65%	88,94%	85,51%	84,93%	88,81%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	42.122.750	235.012.750	199.937.500	250.688.000	222.190.000	34.723.613	196.664.955	151.623.946	220.520.791	202.939.870	82,43%	83,68%	75,84%	87,97%	91,34%		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	-	5.676.000	-	-	-	-	4.886.700	-	-	-	-	86,09%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.184.000	10.890.000	35.511.000	29.696.000	19.423.000	5.184.000	10.656.000	28.609.000	25.651.000	14.681.900	100,00%	97,85%	80,56%	86,38%	75,59%		
Program peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah kecamatan Kotagede	22.468.000	251.521.525	217.468.700	382.059.268	351.805.255	20.772.000	231.065.775	197.208.600	366.219.329,50	346.984.145,92	92,45%	91,87%	90,68%	95,85%	98,63%		
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Kotagede	8.810.000	1.150.750.350	1.050.996.350	1.721.951.100	1.508.505.454	6.360.000	1.114.335.600	1.015.611.930	1.575.023.640	1.406.632.550	72,19%	96,84%	96,63%	91,47%	93,25%		
Jumlah	384.122.570	2.224.748.669	2.019.418.900	3.060.054.386	2.826.393.129	353.187.999	2.065.544.917	1.833.887.011	2.761.258.657,50	2.614.454.124,16							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kotagede

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Kotagede ke depan antara lain :

1. Adanya pegawai yang merangkap beberapa pekerjaan sekaligus, sehingga mengakibatkan kurang maksimal dalam pengerjaan, hal itu disebabkan oleh kurangnya pegawai dikarenakan banyak pegawai yang pensiun sedangkan untuk perekrutan CPNS masih belum ada.
2. Untuk awal Tahun 2018 banyak pegawai di Kelurahan Prenggan yang pensiun, sehingga hanya menyisakan satu orang pegawai, sedangkan di Kecamatan, untuk Seksi Perekonomian dan Pembangunan untuk pertengahan tahun 2017 tidak mempunyai Kepala Seksi maupun staf yang mengampu.
3. Semakin banyaknya pengoperasian Komputer, bahkan hampir semua pelaporan kegiatan dan evaluasi berbasis IT.
4. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Pembagian kerja pegawai secara efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/personil
2. Memaksimalkan pegawai yang ada dengan meningkatkan kompetensi dan kemampuan. Dengan membekali pegawai dengan pengoperasian sistem pelaporan dan evaluasi yang sudah berjalan.
3. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.

4. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan

1. Analisa Internal dan Eksternal

a) Faktor Internal

Kekuatan

- 1) Adanya Kemampuan dan kesempatan untuk mengembangkan pelayanan internal.
- 2) Adanya SOP sesuai ketugasan.
- 3) Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
- 4) Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- 5) Lingkungan kerja yang kondusif.
- 6) Kecamatan Kotagede ditetapkan sebagai Juara dalam Lomba PATEN
- 7) Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.
- 8) Adanya data yang dapat digunakan untuk pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

- 1) Jumlah personil yang ada di Kecamatan Kotagede dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- 2) Sarana dan prasarana instansi perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Terutama untuk petugas front office, diharapkan punya Komputer dimejanya masing-masing saat melayani masyarakat agar pelayanan semakin cepat.
- 3) Ruang pelayanan yang masih belum optimal, sudah dilengkapi dengan ruang laktasi namun kelengkapan ruang laktasi yang sesuai standar belum ada.
- 4) Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

b) Faktor Eksternal

Peluang

- 1) Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.

- 2) Banyaknya wisata budaya yang berupa peninggalan Kerajaan Mataram Islam pada Jaman nya yang masih dilestarikan sampai sekarang yang menarik minat bahkan wisatawan mancanegara.
- 3) Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan / wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada Camat.
- 4) Mulai dikembangkan nya pasar Kotagede menjadi pusat perdagangan di wilayah Kotagede
- 5) Masih adanya minat wisatawan terkait kerajinan perak yang masih begitu marak di Kotagede
- 6) Adanya sistem cluster di Kelurahan Rejowinangun yang menarik minat Desa dan Kelurahan di seluruh Indonesia untuk datang berkunjung dan kesempatan mengenalkan Kotagede ke seluruh Indonesia.
- 7) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
- 8) Adanya sarana kesehatan (Rumah Sakit Daerah, RS Swasta, Puskesmas dll).

Ancaman

- 1) Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- 2) Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.
- 3) Wilayah sekitaran Pasar Kotagede setiap legi selalu membuat lalu lintas menjadi macet, dan masih susah untuk mencari solusinya
- 4) Sampah di sekitar wilayah Kebun Raya Gembiraloka juga sering menjadi permasalahan.
- 5) Gedung Kantor yang semakin besar yang mulai awal Tahun 2017 menjadi lantai dua menjadikan semakin sulit dalam pemeliharaan maupun pengawasan.

c) Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kapasitas instansi
- 2) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat

- 3) Adanya kepercayaan kepada Birokrat
- 4) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
- 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
- 6) Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kotagede

Kecamatan Kotagede dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan kota yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016 sehingga dapat diketahui tugas dan fungsi perangkat daerah khususnya kecamatan dalam mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kinerja sebuah Perangkat Daerah selain tugas pokok dan fungsi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia beserta kompetensi maupun kemampuannya yang tentunya bukan hanya kuantitas yang diutamakan tapi juga kualitasnya, sebagai pelaku dan motor penggerak organisasi kecamatan sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab II. Pelaksanaan ketugasan sumber daya manusia juga harus didukung keberadaan fasilitas berupa sarana dan prasarana kerja yang akan dimanfaatkan oleh sumber daya manusia yang ada juga kinerja pelayanan dan keuangan yang mendukung sebagai salah satu unsur manajemen

Perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh banyak hal, baik sosial, ekonomi, politik, teknologi informasi dan lain sebagainya, harus dapat dimengerti oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menganalisa tantangan dan peluang untuk berkarya sesuai bidang kewenangan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang mudah dan murah tetapi berkualitas.

Identifikasi Permasalahan - permasalahan yang dialami Kecamatan Kotagede dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	eksternal	
Pelayanan, Informasi dan Pengaduan	standar sarpras pelayanan publik belum memenuhi (akses masuk untuk difabel sudah, tapi belum semua fasilitas tercukupi)	SOP dan SPP	fasilitas penunjang Front Office kurang	masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat	kurang fasilitas untuk anak / ruang ramah anak, tidak mempunyai perpustakaan mini, belum mempunyai kursi tunggu yang sesuai standar, dan kelengkapan ruang laktasi yang belum ada
Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	banyak nya pelanggaran perijinan Masyarakat masih mengeluhkan kekurangan Gardu Poskamling di wilayahnya	perda perijinan, perda retribusi perwal pelimpahan kewenangan Laporan dari masyarakat, monitoring ke wilayah	keterbatasan personil untuk selalu memonitoring, walaupun setiap hari seksi tramtib dan BKO selalu melakukan monitoring anggaran yang terbatas sehingga yang dilaksanakan adalah yang prioritas	kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib hukum, kadang menunggu ditegur dulu baru mengajukan ijin keterbatasan lahan untuk membangun pos, atau kadang ada lahan untuk membangun tapi belum ada dana	pembangunan yang tidak ber IMB, kadang sudah ber IMB tetapi papan tidak dipasang. PKL yang tidak berijin atau kadang berjualan di sepanjang trotoar dan jalan keterbatasan wewenang Kecamatan
Perekonomian dan Pembangunan	banyak konblok/jalan lingkungan yang masih berlubang/rusak. Saluran air Hujan yang masih kurang. Sehingga saat hujan beberapa wilayah masih terjadi genangan yang cukup banyak	Laporan dari masyarakat, monitoring ke wilayah	keterbatasan dana dalam pelaksanaan, sehingga yang dilaksanakan dulu yang prioritas maupun yang penting atau urgent dulu	keinginan dan tuntutan masyarakat yang tinggi	keterbatasan wewenang Kecamatan

Pemberdayaan Masyarakat	Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan taraf hidup yang rendah	Data peserta PKH 1079 orang	Keterbatasan personil untuk menangani kegiatan pemberdayaan yang sekian banyak	tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat yang masih rendah	Pelaksanaan Sosialisasi yang kadang tidak tepat sasaran, atau yang datang juga orang yang itu-itu saja
-------------------------	--	-----------------------------	--	--	--

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Perubahan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat dapat menyebabkan revisi terhadap dokumen perencanaan
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
3. Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat rangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan/kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitasi kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat kecamatan dan kelurahan.
5. Belum optimalnya pemahaman standar pelayanan kepada masyarakat
6. Pelaksanaan Sosialisasi yang kadang tidak tepat sasaran, atau yang datang juga orang yang itu-itu saja

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Pemerintah Kota Yogyakarta pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022, maka untuk pembangunan Kota Yogyakarta pada periode lima tahun ke depan (tahun 2017 – 2022), disusun visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Telaah Terhadap Visi

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, bahwa Walikota terpilih telah menetapkan visi “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan “.

Visi tersebut merupakan Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang dilakukan secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan

pembangunan Kota Yogyakarta untuk menuju masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna.

2. Telaah Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Berdasarkan ke 7 misi tersebut Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede mendukung misi 1. Yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya saing untuk kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta dengan sasaran :
 - Kualitas sumber daya manusia meningkat
 - Kemiskinan masyarakat menurun
- b. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan dengan sasaran :
 - Pengangguran terbuka menurun
 - Pendapatan masyarakat meningkat
 - Meningkatkan UMKM yang aktif
 - Meningkatkan motivasi penggiat perak
 - Maju dan berkembangnya Kecamatan Kotagede sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta usaha mikro kecil dan

menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.

- c. Memperkuat keberdayaan masyarakat yang inklusif dengan sasaran
 - Merutinkan Koordinasi dan Pemantauan Paguyuban Keluarga Anak Dengan Kedisabilitas
 - Membangun fasilitas-fasilitas publik yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas
 - Meningkatkan peran serta perempuan, Lansia dan meningkatkan kreativitas anak-anak
 - Menciptakan Lingkungan Kecamatan Inklusi yang menjamin terpeliharanya masyarakat Inklusi
- d. Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta dengan sasaran :
 - Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat
 - Moral dan Spiritual generasi muda meningkat
 - Melestarikan seni dan budaya tradisional
- e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan sasaran :
 - Menambah ruang terbuka hijau publik
 - Pencemaran lingkungan hidup terkendali khususnya daerahsungai
 - terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. Meningkatkan Kualitas pendidikan dengan sasaran :
 - Meningkatkan kualitas pendidik PAUD
 - Meningkatkan minat belajar anak sekolah
- g. Meningkatkan Usia harapan hidup dengan sasaran :
 - Meningkatkan kualitas kader kesehatan
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
 - Meningkatkan kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk ibu hamil dan bayi maupun ibu yang baru melahirkan
- h. Meningkatkan pariwisata berbasis budaya dengan sasaran :
 - Meningkatkan dan menampilkan potensi yang ada di masyarakat
 - Menciptakan kawasan wisata budaya dan menggiatkan kembali usaha perak
- i. Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman dengan sasaran :
 - Memperbaiki akses jalan, peresapan air
 - Sungai yang tidak meluap saat banjir

j. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran :

- Meningkatkan kemampuan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Meningkatnya etos kerja berkemajuan yaitu cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman dan mencerahkan.

Tabel 3.2

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan OPD terhadap pencapaian visi misi dan program wakil KDH terpilih

Visi : “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”

No	misi dan program KDH dan wakil KDH terpilih	permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			pendukung	penghambat
1	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	OPD Kecamatan hanya memfasilitasi kegiatan berupa pelatihan-pelatihan dan penyuluhan yang sesuai dengan penjangkaran aspirasi peserta PKH, bukan memberikan bantuan hibah atau barang	Tim Kecamatan dan Kelurahan yang solid dan dibantu oleh koordinator PKH di wilayah yang sangat membantu pelaksanaan program-program OPD	masyarakat miskin (PKH) kebanyakan lebih suka diberi bantuan berupa uang atau barang daripada diajak untuk berkembang.
2	Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	Sudah ada beberapa KUBE yang maju dan Menggiatkan pelaku UMKM	Tim Kecamatan dan Kelurahan yang solid dan dibantu oleh koordinator di wilayah yang sangat membantu pelaksanaan program-program OPD	Sudah ada beberapa KUBE yang maju dan berkembang tetapi biasanya yang bersemangat hanya orang-orang itu saja, jarang terlihat orang baru
3	Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Penegakan Perda dan kesadaran warga yang masih rendah	Tim Tramtib yang selalu memonitor ke wilayah-wilayah dan selalu mengingatkan yang melanggar	Masyarakat kadang menunggur ditegur baru melaksanakan ijin-ijin yang diperlukan
4	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	Kotagede merupakan wilayah Budaya yang kaya seni, tetapi setiap kelompok kesenian yang ikut kebanyakan yang sudah tua	Kelompok-kelompok kesenian yang masih rajin berlatih dan mengikuti perlombaan dan masih aktif sampai saat ini	kurangnya regenerasi kepada generasi muda, yang lebih ketergantungan teknologi daripada kecintaan terhadap seni
5	Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	kurangnya Ruang Terbuka Hijau di sekitar wilayah yang dilewati Sungai Gajahwong	keinginan masyarakat yang tinggi untuk memiliki Ruang Terbuka Hijau Publik	lahan yang tidak tersedia dikarenakan wilayah permukiman warga yang dekat sungai

6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Daerah sekitar Kelurahan Rejowinangun perlu dilakukan pemeliharaan SAH, Permukiman disepanjang sungai Gajah Wong perlu diberi bronjong agar saat banjir sungai tidak meluap	adanya dana Stimulan PMK atau Stimulan RW yang bisa digunakan warga untuk mengatasi keterbatasan dana	keterbatasan dana dalam pelaksanaan, sehingga yang dilaksanakan dulu yang prioritas maupun yang penting atau urgent dulu
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Sistem Teknologi Informasi diperlukan oleh semua OPD sehingga membutuhkan dukungan kompetensi yang memadai untuk semua pegawai dan pejabat	banyak nya program diklat yang ditawarkan oleh BKPP	banyak pegawai yang akan pensiun yang sudah tidak mampu melakukan pembelajaran TI dan memasrahkan pada yang masih muda

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
				2015	2019
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa		Jumlah peristiwa konflik sosial	≤ 83 peristiwa	≤ 83 peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,2%	77,5%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10 %	< 10 %
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 perda	50 perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah	30%	70%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki	34	34

			PTSP yang Prima	provinsi	provinsi dan 204 kab/ kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% provinsi 5% Kab/kota	100% provinsi 30% Kab/kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah		Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
1	2	3		4	5
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	30 prop. 250 Kab/kota	30 prop. 300 Kab/kota
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5.000 desa	40.000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5.000 desa	40.000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2.000 desa	10.000 desa
8	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	34 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan	1	Peningkatan pemanfaatan NIK,	21	40

	database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional		Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	lembaga	lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
1 0	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
1 1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
1 2	Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Dari Sasaran Kemendagri diatas, sebenarnya tidak ada yang langsung bisa disasar oleh Kecamatan Kotagede, karena dari Sasaran Kemendagri tersebut Kecamatan hanyalah kepanjangan tangan dari Perangkat Daerah yang langsung menysasar.

3.3.2 Telaahan Renstra Biro Tapem DIY

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem DIY

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan OPD terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil	Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi	Terdapat petugas OPD terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil	Hasil akhir pelayanan tetap berada di OPD teknis terkait
Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kegiatan forkopimka perlu diptertegas kembali terkait dengan kewenangan	Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina	Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka

dan otonomi daerah Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD	penganggarannya	pemerintahan umum lintas sektor	
---	-----------------	------------------------------------	--

Referensi renstra lembaga lain pada tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah *Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas*. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJP Kota Yogyakarta terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan peningkatan manajemen pemerintahan, perbaikan proses perencanaan khususnya menyangkut proses pelibatan masyarakat, peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan berintegritas tinggi.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Pemerintah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

Dalam Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta memaknai Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri sebagai kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam

penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

Banyak benang merah yang dapat ditarik dari Renstra Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Visi dan Misi Walikota Yogyakarta terpilih. Oleh karenanya dengan keyakinan yang cukup bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede akan turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra DIY.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- d. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- e. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;

- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyeleenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi (1) pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan, (2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arah kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan

untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait dengan tata ruang wilayah Kecamatan Kotagede dalam struktur ruang kota, diarahkan sebagai pendukung kawasan wisata budaya yang pengembangannya lebih fleksibel.

Tabel 3.7
HASIL TELAAHAN STRUKTUR RUANG WILAYAH

no	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang saat ini	Indikasi	
			Penghambat	Pendorong

1	sistem perkotaan	kawasan wisata budaya	Toko-toko perak yang buka masih sama, dan belum ada peningkatan. Juga belum ada regenerasi	Kotagede mempunyai situs makam raja-raja mataram dan masih minatnya wisatawan terhadap kerajinan perak di wilayah Kotagede
2	sistem jaringan transportasi	Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota di Jl. Ngeksigondo	jika jalan depan Gembiraloka sedang diperbaiki, biasanya jl. Ngeksigondo dan Jl. Merupakan jalan alternatif pengalihan, sehingga menyebabkan kemacetan	Jl. Ngeksigondo adalah jalan yang relatif lancar walaupun ada bus transjogja dan merupakan jalan alternatif lintas kabupaten, dengan ruas jalan yang terpelihara
3	sistem jaringan energi	Pengembangan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat sudah banyaktersebar	tarif dasar listrik yang meningkat di awal tahun 2017	Kotagede dekat dengan PLN gardu Induk di daerah Gedong kuning
4	sistem jaringan telekomunikasi	Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi sudah banyak tersebar	warnet-warnet yang ada terancam gulung tikar	kebutuhan masyarakat akan internet sangat besar sehingga kampung-kampung banyak memasang hotspot
5	sistem prasarana pengelolaan lingkungan			
	a. sistem drainase	Setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.	keterbatasan pelimpahan wewenang Kecamatan	SAH Lingkungan sudah menjadi wewenang Kecamatan dan bisa ditindaklanjuti dengan cepat

	b. sistem persampahan	Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan dan mendaur ulang sampah dan pengadaan truk sampah	banyaknya sampah rumah tangga dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah	semangat ibu-ibu PKK yang mau belajar daur ulang sampah plastik yang kian hari kian banyak
	c. sistem penyediaan air bersih	sistem air bersih non perpipaan milik perorangan dan berupa sumur di Mandi Cuci Kakus (MCK) umum dengan menggunakan alat penjernih secara permanen.	masih ada nya MCK warga atau MCK umum yang kurang terpelihara	walaupun dekat dengan sungai Gajahwong, namun air di daerah Kotagede sangat bersih
	d. sistem pengelolaan limbah	Jaringan air limbah tersebar diseluruh Kecamatan secara merata memenuhi kebutuhan masyarakat.	Belum ada nya usaha untuk mengolah limbah menjadi sesuatu yang berguna	meningkatnya kesadaran para pengusaha mikro kecil menengah untu membuang limbah produksinya ke sungai
6	sistem jaringan penerangan jalan	meliputi penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh pemerintah daerah	Wewenang Kecamatan hanya untuk mengganti lampu penerangan (pemeliharaan) untuk pemasangan baru menjadi wewenang DPUPKP	untuk penggantian / pemeliharaan lampu PJU setiap tahunnya target nya terpenuhi

Struktur ruang yang ada di wilayah Kecamatan Kotagede cukup fleksibel terhadap perubahan, namun perubahan tersebut bukan ke arah perubahan pola akan tetapi perubahan struktur ruang. Oleh karena itu perlu pencermatan terhadap perkembangan wilayah terbangun di wilayah Kecamatan Kotagede agar struktur ruang yang ada tetap terjaga dengan baik.

Rencana struktur ruang adalah inti pelestarian sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan dan citra pendidikan. Struktur pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman dengan intensitas pengembangan sedang dan memperhatikan karakter lingkungan. Kecamatan

Kotagede dilewati oleh Sungai GajahWong sehingga memiliki potensi kerawanan bencana di beberapa titik.

Untuk selanjutnya hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaa berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
Kawasan Lindung Daerah				
a. kawasan perlindungan setempat	Ruang Terbuka Hijau Publik yang tersedia masih minim	memanfaatkan lahan sekitar sungai Gajahwong untuk Ruang Terbuka Hijau Publik	Mebutuhkan koordinasi dalam penghitungan kebutuhan RTH dan Permukiman layak huni	Penataan lingkungan pemukiman
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kotagede Mempunyai daya tarik sebaga kawasan Budaya dan Penghasil Perak	Meneguhkan sebagai kawasan wisata budaya	Mebutuhkan koordinasi dengan Dinas terkait dan mengiatkan kembali Pengusaha Perak	Menjadikan Kotagede menjadi Daerah Wisata Budaya dan memperkuat UMKM yang ada
c. kawasan rawan bencana	permukiman sepanjang sungai Gajahwong rawan longsor jika sungai meluap	bantaran sungai Gajahwong membutuhkan lebih banyak lagi dibangun bronjong	Koordinasi berkesinambungan antara BPBD dan Keamanan Masyarakat yang ada	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

Tabel 3.9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/ Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah	Dibalik peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, terdapat permasalahan dalam upaya peningkatan luasan ruang terbuka hijau untuk masa mendatang, yakni adanya kendala mengenai keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau	padatnya permukiman di wilayah Kotagede terutama di Kelurahan Purbayan. Sehingga rumah-rumah sudah saling berdempetan. Hal ini dikarenakan sebenarnya wilayah Kotagede tidak terlalu besar tetapi jumlah KK nya lumayan banyak	keinginan masyarakat untuk memiliki Ruang Terbuka Hijau Publik
2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	belum semua bangunan yang ada di Kota Yogyakarta memiliki izin saat bangunan tersebut dibangun	masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan ijin IMB saat membangun ataupun merenovasi rumahnya, seandainya sudah pun kadang tidak dipasang	Seringnya seksi trantib dan BKO memonitoring wilayah dan mengingatkan kepada masyarakat yang sedang mulai membangun atau merenovasi rumahnya
3. Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya	Ruang Publik yang tersedia masih berfungsi sebagaimana peruntukannya		

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih

memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan akan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh

KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh

tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Kotagede Mempunyai daya tarik sebaga kawasan Budaya dan Penghasil Perak, karena itu untuk kedepannya Kecamatan Kotagede berharap untuk Meneguhkan Kotagede sebagai kawasan wisata budaya. Perlu juga mendapat perhatian bahwa dalam upaya pengembangan pariwisata di samping dampak positif bagi masyarakat sekitar objek juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya pengembangan objek wisataperlu diperhitungkan dampak negatif yang ditimbulkan demi kelestarian objek wisata tersebut maupun kelestarian fungsi lingkungan sekitar kawasan wisata.

Pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ternyata mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hal yang sama juga terjadi dalam pengembangan pariwisata, dimana disamping pengembangan pariwisata itu sendiri menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar objek wisata, pengelolaan lingkungan dan pengelolaan objek wisata itu sangat mempengaruhi kelestarian fungsi lingkungan dan objek wisata itu sendiri. Seperti halnya dengan kegiatan-kegiatan kepariwisataan, pengelolaan kawasan pariwisata yang banyak dibangun diberbagai wilayah perlu mendapat pengamanan agar tidak terjadi ketimpangan terhadap masyarakat di sekitarnya, sehingga dapat mewujudkan adanya keserasian dan keseimbangan

Pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak positif diantaranya: peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Selain dampak positif terdapat juga dampak negatif dari pembangunan pariwisata, Dampak negatif pengembangan pariwisata bisa berupa pembuangan sampah sembarangan juga penggunaan yang berlebihan untuk kunjungan wisata menyebabkan situs sejarah, budaya dan keagamaan mudah rusak. Kepadatan di daerah wisata, komersialisasi daerah wisasta menjadi beberapa contoh dampak negatif kegiatan wisata terhadap lingkungan fisik. Situs keagamaan didatangi oleh banyak wisatawan sehingga mengganggu fungsi utama sebagai tempat

ibadah yang suci. Situs budaya digunakan secara komersial sehingga dieksploitasi secara berlebihan. Kapasitas daya tampung situs sejarah, budaya dan keagamaan dapat diperkirakan dan dikendalikan melalui manajemen pengunjung sebagai upaya mengurangi kerusakan pada situs sejarah, budaya dan keagamaan.

Upaya preventif serta renovasi dapat dilakukan untuk memperpanjang usia situs-situs tersebut. Oleh karena itu dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang.

Penurunan kualitas ruang kota ditunjukkan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan PKL sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis maupun tempat-tempat yang strategis merupakan hak PKL. PKL mengambil ruang dimana-mana tidak hanya ruang kosong atau terabaikan, tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. PKL secara ilegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen juga. Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakkan, sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal (pencopetan). Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko. Selain itu, pada beberapa tempat keberadaan PKL mengganggu para pengendara kendaraan bermotor dan mengganggu kelancaran lalu lintas

Dalam perkembangannya PKL menghadapkan pemerintah pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota sering kali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. PKL telah memberikan dampak negatif terhadap tatanan kota, sedangkan terhadap masyarakat keberadaan PKL

selain memberikan dampak negatif juga memberikan manfaat/dampak positif terhadap masyarakat.

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, Sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki daya beli rendah, Dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

Dengan demikian, dapat dikatakan adanya persoalan PKL ini menjadi beban berat yang harus ditanggung pemerintah kota dalam penataan kota.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis Strategis

Seperti yang disebutkan diawal tadi, Tugas Utama Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing – masing. Pelayanan Publik khususnya dibidang pelayanan perizinan dan kependudukan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat mempunyai arti Kecamatan mempunyai tugas untuk Memberdayakan masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, memungkinkan suatu masyarakat dapat mengembangkan diri dalam mencapai kemajuan. atau dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Secara garis besar ada 2 (dua) Isu strategis yang bisa dirumuskan, yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Untuk meningkatkan Pelayanan Publik terhadap masyarakat, hal – hal yang harus dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur
2. Meningkatkan Standar sarpras pelayanan masyarakat
3. Keterbukaan mengakses informasi pelayanan kependudukan
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat
5. Kebebasan Masyarakat menyampaikan masukan tentang pelayanan

2. Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Kotagede. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

a) Pemberdayaan Fisik

1. Mengurangi jumlah genangan air di wilayah
2. Meningkatkan tingkat kebersihan air di sungai Gajahwong
3. Pemanfaatan Balai RW untuk berbagai macam kegiatan
4. Memberikan kenyamanan akses jalan masuk kampung
5. Peningkatan permukiman disekitaran sungai sehingga bisa layak huni dan bebas dari bencana
6. Penambahan ruang terbuka hijau public khususnya di daerah sekitar sungai Gajahwong

b) Pemberdayaan Non Fisik

1. Memberdayakan dan membekali masyarakat dengan kemampuan berwirausaha
2. Pengolahan Sampah mandiri dan Daur ulang Sampah
3. Antisipasi terhadap Bencana
4. Memperkuat kelompok – kelompok kesenian terutama untuk generasi muda
5. Meningkatkan UMKM dan KUBE yang ada di masyarakat
6. Mengembangkan wisata budaya di sekitaran makam raja mataram
7. Memberdayakan dan membekali masyarakat dengan kemampuan berwirausaha
8. Peningkatan kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan adalah : “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kotagede”

Rumusan Indikator Tujuan

Indikator yang dipakai sekarang adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede. Hal ini digunakan untuk menilai Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede, jadi kita bisa mengetahui apakah program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Perangkat Daerah mempunyai dampak langsung terhadap perkembangan pembangunan wilayah Kecamatan Kotagede.

4.1.2 Sasaran

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh OPD Kecamatan Kotagede untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Kotagede menetapkan Sasaran sebagai berikut: “Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat”.

Rumusan Indikator Sasaran

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 350, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 355.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede	350	351	352	353	354	355

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kotagede Tahun 2017 - 2022 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan. Indikasi rencana program prioritas adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS OPD

Program / Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategik Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta meliputi.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin / berkala Gedung/ Bangunan Kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD

B. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN KOTAGEDE

1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede
2. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kotagede
3. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede
4. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede
5. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun
6. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan
7. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan
8. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede

Sedangkan Program dan Pendanaan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan pendanaan Indikatif OPD Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta

Tabel 6.1

Rencana Program dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								2017		2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Perangkat Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
URUSAN WAJIB																							
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																							
Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kotagede						Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede	350	350		351		352		353		354		355		355		Kec. KG	Kec. KG
	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede Meningkat					Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede	350	350		351		352		353		354		355		355			

		02.07.14.002.024	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit	-		-		-		-		-		
					Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit				1 unit				1 unit			
					Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	14 unit	14 unit		14 unit		14 unit			14 unit		14 unit			14 unit			
		02.07.14.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	60,340,000	100%	7,200,000	100%	7,416,000	100%	7,638,480	100%	7,867,634	100%	8,103,663	100%	98,565,776		
		02.07.14.006.005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian		Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun	5 dok	5 dok		5 dokumen		5 dokumen	-		-		-		-		-		

			kinerja SKPD		Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun	5 dok	5 dok		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen					
		02.07.14.063	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	70	70	2,220,361,412	71	2,435,920,722	71	2,508,998,342	73	2,584,268,292	74	2,661,796,341	75	2,741,650,230	75	4,193,582,635		
					Tingkat Swadaya Masyarakat	20%	20%		21%		22%		23%		24%		25%		25%			
		02.07.14.063.001	Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kecamatan Kotagede		Linmas yang terbina	10 kali	10 kali	144,271,500	10 kali	286,954,200	10 kali	295,562,826	10 kali	304,429,710	10 kali	313,562,601	10 kali	322,969,479	10 kali	1,667,750,314		
					PKL yang tertib dan tertata	50 orang	50 orang				50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang			
					Sambang Kampung, operasi ketertiban dan vandalisme yang terlaksana	110 kali	110 kali		100 kali			110 kali		110 kali		110 kali		110 kali		110 kali		
					Koordinasi Forkompika yang terlaksana	11 kali	11 kali		11 kali			11 kali		11 kali		11 kali		11 kali		11 kali		

									40 orang	40 orang		40 orang	40 orang		40 orang		40 orang						
									1 kali	1 kali		1 kali	1 kali		1 kali		1 kali						
									30 orang	30 orang		30 orang	30 orang		30 orang		30 orang						
									50 orang	50 orang		50 orang	50 orang		50 orang		50 orang						
									80 orang	80 orang		80 orang	80 orang		80 orang		80 orang						
									20 orang	20 orang		20 orang	20 orang		20 orang		20 orang						
									20 orang	20 orang		20 orang	20 orang		20 orang		20 orang						
									30 orang	30 orang		30 orang	30 orang		30 orang		30 orang						
									30 orang	30 orang		30 orang	30 orang		30 orang		30 orang						
									1 kali	1 kali		1 kali	1 kali		1 kali		1 kali						
		02.07.14.063.006	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan						4 kali	4 kali	249,601,150	4 kali	148,654,150	4 kali	153,113,774	4 kali	157,707,187	4 kali	162,438,403	4 kali	167,311,555	4 kali	1,038,826,217
									14 RW, 58 RT	14 RW, 58 RT		14 RW, 58 RT	14 RW, 58 RT		14 RW, 58 RT	14 RW, 58 RT	14 RW, 58 RT	14 RW, 58 RT		14 RW, 58 RT	14 RW, 58 RT		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta mempunyai tujuan memberi keberhasilan pencapaian perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede. Kondisi kinerja 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada capaian setiap tahun. Sehingga dapat terlihat pula kondisi akhir periode RPJMD. Adapun Indikator kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kecamatan Kotagede dapat dilihat dalam Tabel 6.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede	350	350	351	352	353	354	355	355

